



Judul : Pemindehan ibu kota, DPR batalkan pembangunan gedung
Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PEMINDAHAN IBU KOTA

DPR Batalkan Pembangunan Gedung

JAKARTA, KOMPAS — DPR akhirnya membatalkan rencana keinginannya untuk membangun gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembatalan pembangunan gedung baru DPR, menyusul rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindehan ibu kota negara yang direncanakan mulai pada 2024, prioritas di antaranya akan diikuti pula dengan rencana pembangunan gedung anggota legislatif.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing, Jumat (20/9/2019), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjelaskan, semula gedung baru untuk DPR tersebut akan dibangun di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada tahun depan.

"Awalnya pimpinan DPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan sudah menyepakati pembangunan gedung baru DPR dilaksanakan tahun depan. Namun, hal itu harus dibatalkan karena ada rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim," kata Anthon.

Catatan *Kompas*, sejak tiga tahun lalu, DPR telah berencana untuk membangun gedung baru bagi anggota DPR dengan biaya pembangunan tahap I sebesar Rp 601,93 miliar. Namun, rencana pembangunan gedung tersebut menuai kritik dari banyak kalangan masyarakat. Alasannya, pembangunan gedung baru DPR itu dinilai memboroskan keuangan negara dan tak sejalan dengan efisien anggaran.

Namun, pada 2018, Ketua DPR Bambang Soesatyo berkeras menyatakan, pemba-

ngunan Gedung DPR menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena adanya penambahan 15 anggota DPR baru untuk periode 2019-2024. Hingga September 2019, rencana pembangunan gedung tersebut belum dilaksanakan.

"Oleh karena itu, kami tidak jadi pindah. Untuk menampung 15 anggota DPR baru periode 2019-2024, kami memanfaatkan ruangan yang ada terlebih dahulu. Di antaranya, ruangan di lantai 3, Gedung Nusantara I," jelas Anthon.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota termasuk memindahkan Kompleks Parlemen ke ibu kota yang baru. Pertimbangannya, Kompleks Parlemen harus dekat dengan pusat pemerintahan sehingga memudahkan koordinasi dan rapat kerja.

Bentuk Pansus

Selain kesiapan pemerintah dalam hal regulasi dan pembangunan infrastruktur dasar, DPR juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru. Pansus dipimpin anggota DPR, Zainudin Amali, sebagai Ketua Pansus. Pembentukan pansus di antaranya bertujuan mengkaji sumber pembiayaan untuk membangun ibu kota.

Pansus DPR, kata Zainudin, seperti dikutip dari Kompas.com, juga akan membahas lokasi yang lebih spesifik terkait lingkungan di lokasi ibu kota yang baru. "Pembahasan DPR bukan hanya lingkungan hidup, melainkan juga sosial dan lainnya," ujar Zainudin.

(DVD)